



(Cyanda 2010)

 bappeda.kukarkab.go.id

 [bappeda.kutaikartanegara](https://www.instagram.com/bappeda.kutaikartanegara)

 [bappeda kutai kartanegara](https://www.youtube.com/bappeda_kutai_kartanegara)

 [bappeda kutai kartanegara](https://www.facebook.com/bappeda.kutai.kartanegara)

RENCANA STRATEGIS

BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026

ASUS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang merupakan suatu dokumen perencanaan strategis sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari dokumen dan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Selain itu juga Rencana Strategis bertujuan menyediakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah (lima tahunan) guna memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dibidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance).

Dokumen rencana strategis ini juga merupakan arahan dan pedoman kepada seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati, sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati tersebut dapat tercapai selama kurun waktu lima tahun kedepan. Demikian Dokumen Rencana Strategis ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi acuan dalam urusan perencanaan.

Tenggarong, September 2021
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Wiyono, S.I.P, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690204 199003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.1. LANDASAN HUKUM	2
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.3. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II	7
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA	7
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA	7
2.1.1 Tugas	7
2.1.2 Fungsi.....	7
2.2 SUMBER DAYA BAPPEDA.....	10
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	10
2.2.2 Sarana Dan Prasarana.....	12
2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPEDA.....	15
2.4 PELAKSANAAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA	20
2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA	25
2.5.1 Tantangan	25
2.5.2 Peluang.....	25
BAB III	27
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA	27
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI PELAYANAN	27
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, & PROGRAM KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	28
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN TELAAHAN RENSTRA PROVINSI	31
3.3.1 Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	32
3.3.2 Telaahan Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur	33
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	34
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	34

3.4.2	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	34
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	36
BAB IV		38
TUJUAN DAN SASARAN		38
4.1	TUJUAN.....	38
4.2	SASARAN	39
BAB V		42
STRATEGI DAN KEBIJAKAN		42
4.3	Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.....	42
BAB VI		45
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		45
6.1	Rencana Program dan Kegiatan.....	45
BAB VII		72
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		72
BAB VIII		73
PENUTUP		73
8.1	Kesimpulan.....	73
8.2	Kaidah Pelaksanaan.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Barang BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara.....	12
Tabel 2.TC.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara	18
Tabel 3 TC.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara.....	20
Tabel 4. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	27
Tabel 5. Pelayanan Bappeda terhadap pencapaian Visi dan Sasaran RPJMD Kab.Kutai Kartanegara	30
Tabel 6. Pelayanan PD Bappeda berdasarkan Telaah Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS. ...	32
Tabel 7. Pelayanan PD Bappeda berdasarkan Telaah Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur	33
Tabel 8. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	35
Tabel 9.Tabel. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026	40
Tabel 10. Casacading Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	42
Tabel 11. T.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah	46
Tabel 12. Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara	9
Gambar 2. Komposisi ASN berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan ASN BAPPEDA Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Gambar 3. Komposisi ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Gambar 4. Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat pendidikan dan Pangkat/Golongan	11
Gambar 5. Keterkaitan Tujuan Bappeda dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026	39
Gambar 6. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran RPJMD dan Renstra Bappeda	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 272 mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 72 Tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPPEDA sebagai Perangkat Daerah menyelenggarakan fungsi : a). Penyusunan Kebijakan Teknis di bidang perencanaan, b). Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis di bidang perencanaan, c). pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, e). pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 wajib disusun sebagai penjabaran visi, misi dan

program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan sesuai dengan urusan perencanaan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini dilakukan dengan memformulasikan secara linear atas perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Bappeda dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja, Renstra Bappeda juga dilakukan perumusan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang lebih terukur guna akselerasi pencapaian Visi dan Misi daerah sesuai dengan RPJMD.

1.1 LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang -undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 140, tambahan lembaran Negara RI nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klarifikasi, kodefikasi dan nomeklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 9);

25. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 21).
26. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2014, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan maksud untuk menyesuaikan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dalam upaya percepatan pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2021–2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsi.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021-2026 BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Sebagai instrumen untuk pengendalian pelaksanaan Renstra BAPPEDA 2021-2026.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 disusun dengan sitematika:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2. Sumber Daya BAPPEDA
3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi BAPPEDA
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan
2. Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi
2. Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan, dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1 Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2016 tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi:

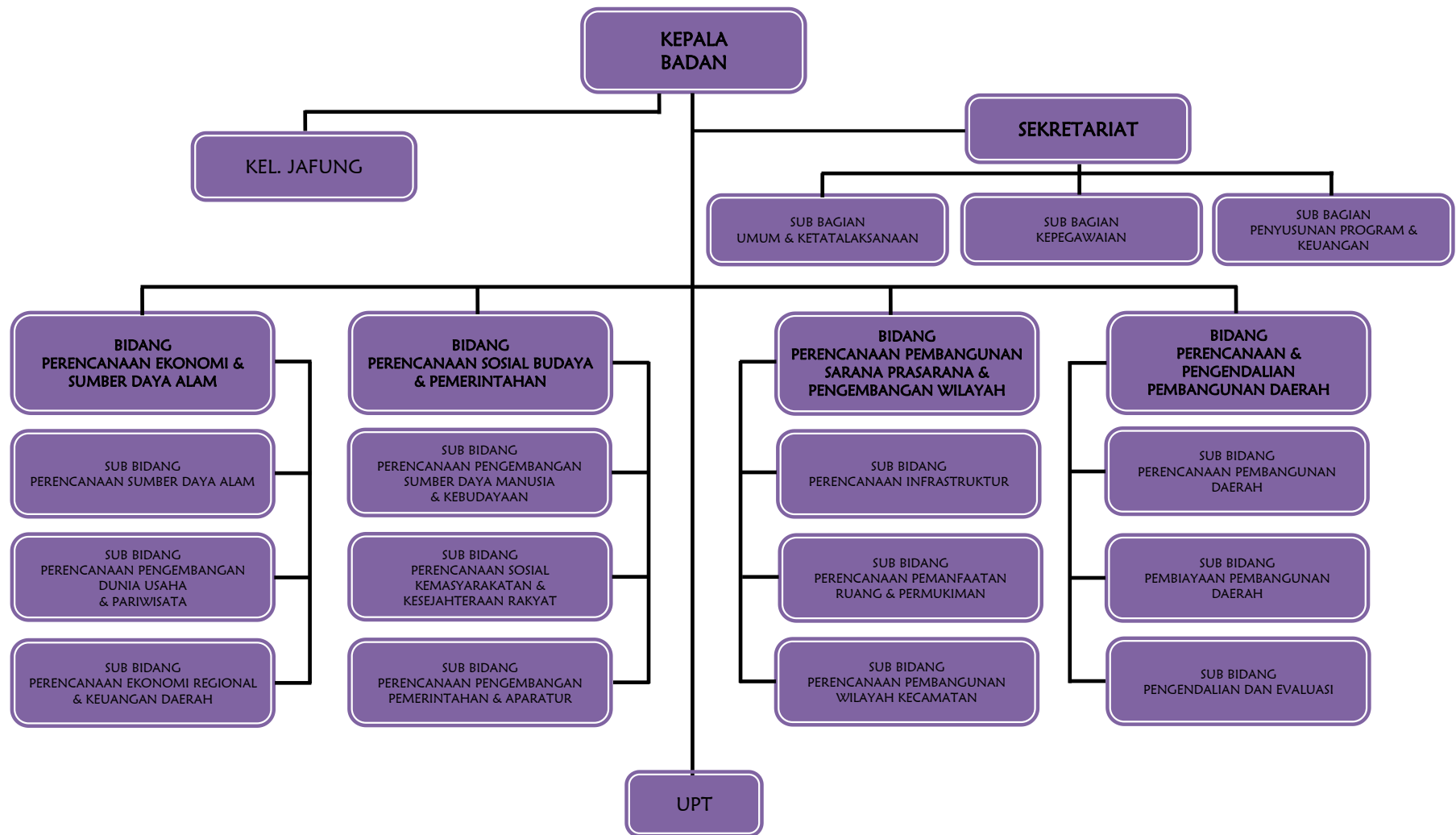
- a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan;
- c. Bidang Perencanaan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
 - 3. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah.
- d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya Dan Pemerintahan membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kebudayaan;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 3. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur.
- e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman;
 - 3. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan.
- f. Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah;
 - 3. Sub Bidang Pengendalian Dan Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)



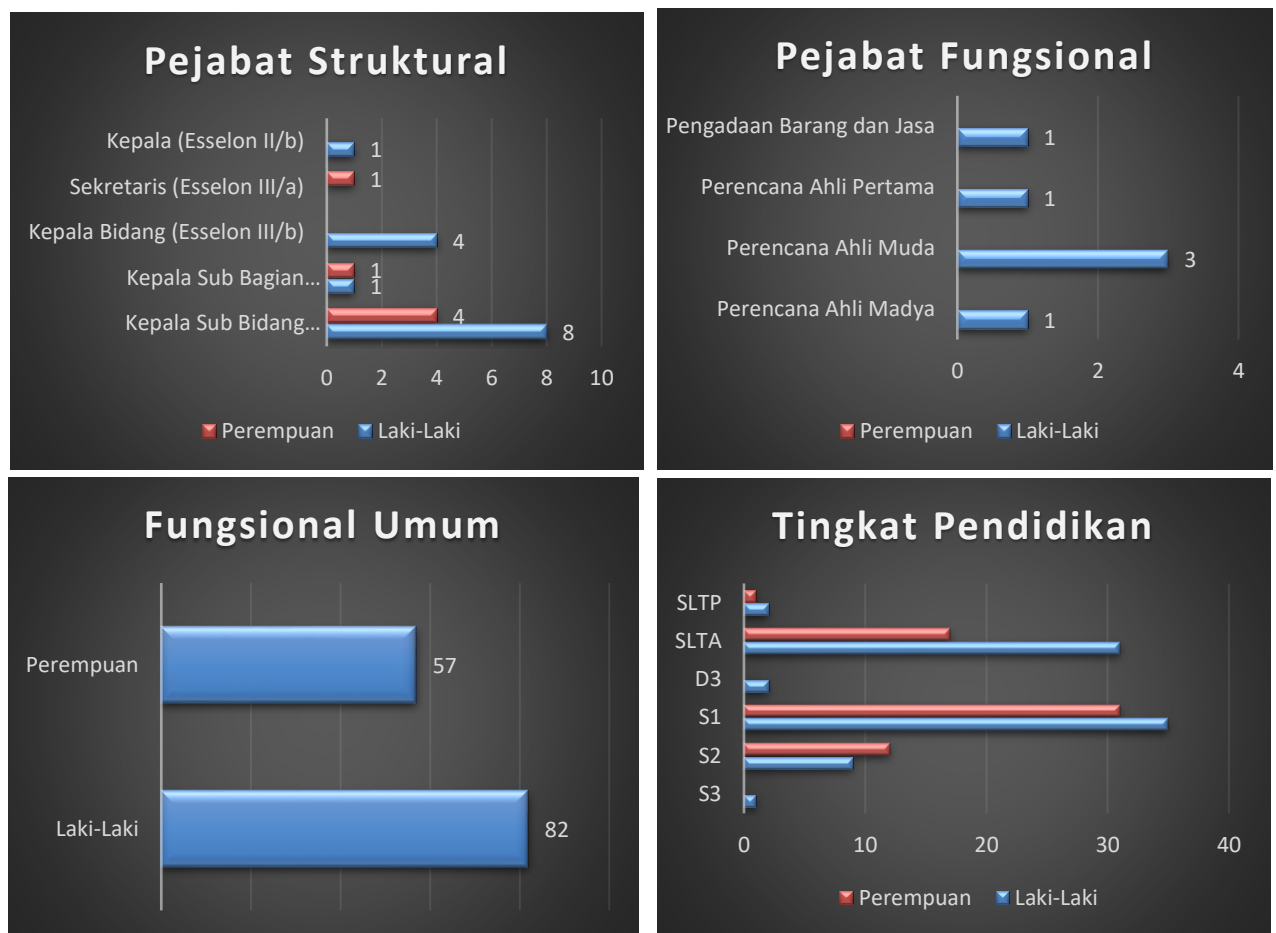
Gambar 1. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara

2.2 SUMBER DAYA BAPPEDA

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan motor penggerak jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut terdapat sejumlah aparatur maupun tenaga pendukung di BAPPEDA. Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

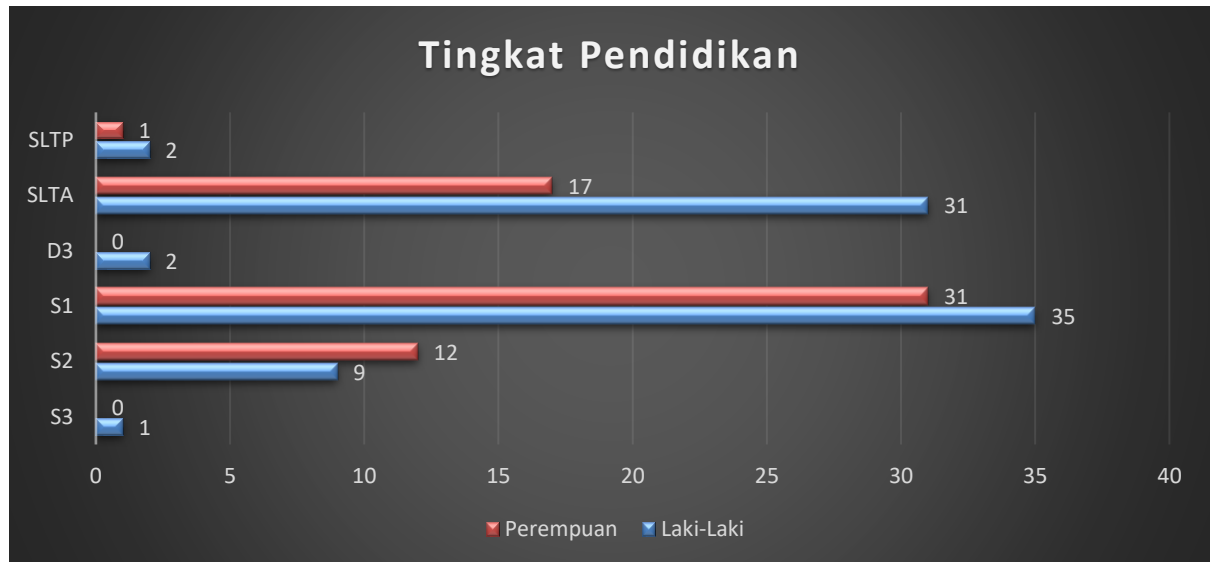
Adapun jumlah pegawai di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 sebanyak 140 orang. Penjelasan mengenai pegawai BAPPEDA disajikan pada tabel-tabel berikut ini.



Gambar 2. Komposisi ASN berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan ASN BAPPEDA Berdasarkan Jenis Kelamin

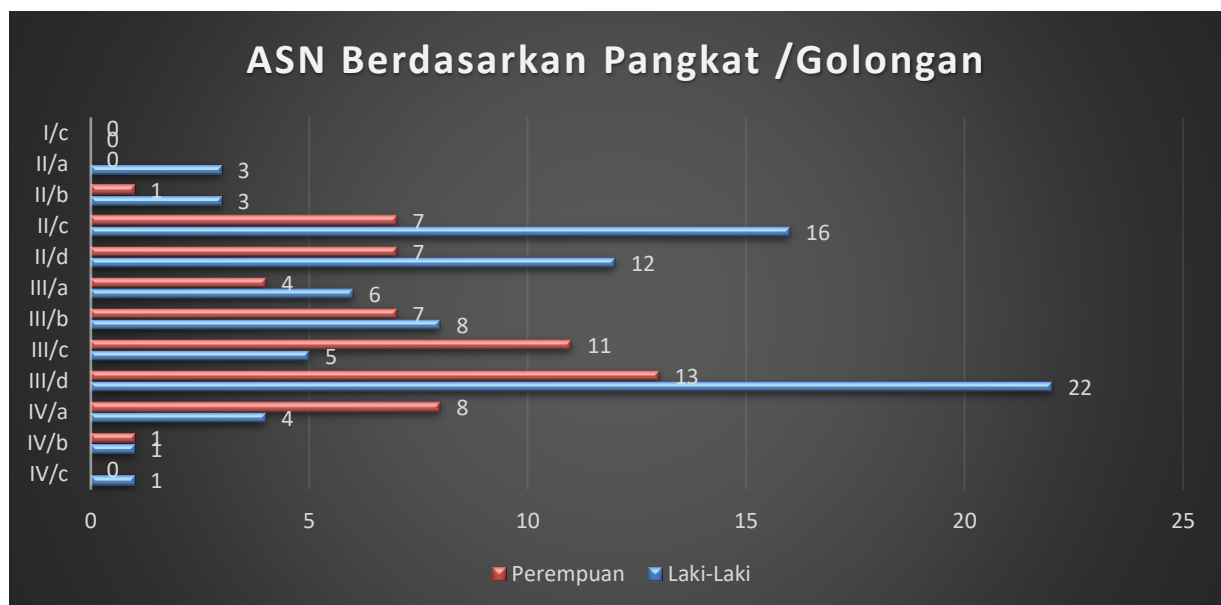
Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) BAPPEDA, Per Juni 2021

Berdasarkan data pada infographic diatas, diketahui bahwa ASN BAPPEDA yang berpendidikan S1 dan SLTA memiliki jumlah paling banyak yaitu masing-masing 66 dan 48 orang. Sedangkan ASN yang berpendidikan S2 sebanyak 21 orang, S3 1 orang, D3 2 Orang dan SLTP 3.



Gambar 3. Komposisi ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk komposisi ASN berdasarkan pangkat/golongan disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 4. Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat pendidikan dan Pangkat/Golongan

Sumber: Sub bagian Kepegawaian BAPPEDA, Per Juni 2021

2.2.2 Sarana Dan Prasarana

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas dan fungsi didukung oleh sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Barang BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

No	Nama Barang	Jumlah
A.	Alat-alat Angkutan 102	
1	Station Wagon	4
2	Kendaraan Dinas Esselon II	1
3	Kendaraan Dinas Esselon III	5
4	Pick Up	3
5	Sepeda Motor	65
6	Scooter	24
B.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	Global Positioning System	3
2	Scanner	2
3	Air Conditioning Unit	10
4	Compresor Unit	1
C.	Lemari	
1	Lemari Penyimpanan	1
D.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1
2	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	2
3	Mesin Ketik Elektronik	1
4	Mesin Hitung Elektronik	1
5	Mesin Calculator	5
6	Mesin Penghitung Uang	2
7	Mesin Hitung/Jumlah Lain-lain	1
8	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	2
9	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa doble folio	3
10	Lemari Besi	43
11	Rak Besi/Metal	18
12	Rak Kayu	3
13	Filling Besi/Metal	10
14	Band Kas	11
15	Peti Uang	8
16	Papan Visuil	1
17	Perkakas Kantor	94
18	Alat Pengamatan/Sinyal	20
19	Alat Penghancur Kertas	14
20	Papan Nama Instansi	1

No	Nama Barang	Jumlah
21	White Board	8
22	Mesin Absensi	4
23	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	28
24	Partisi	2
25	Lemari Kayu	94
26	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	5
27	Meja Rapat	42
28	Meja Tulis	16
29	Meja Makan	5
30	Meja Reseption	3
31	Meja Tambahan	39
32	Meja Panjang	2
33	Kursi Rapat	81
34	Meja Komputer	7
35	Sofa	48
36	MOUBILER LAINNYA	1
37	Jam Elektronik	27
38	Mesin Penghisap Debu	1
39	Alat Pembersih Lain-lain	36
40	Lemari Es	6
41	AC Unit	10
42	AC Split	1
43	Kipas Angin	6
44	Alat Dapur Lainnya	406
45	Alat Dapur Lainnya	441
46	Alat Dapur Lain-lain	402
47	Televisi	18
48	Sound System	3
49	Wireless	2
50	Unit Power Supply	1
51	Camera Film	2
52	Tustel	10
53	Lambang Garuda Pancasila	11
54	Gambar Presiden/Wakil Presiden	11
55	Lift	2
56	Dispenser	10
57	Mimbar/Podium	1
58	Handy Cam	14
59	Alat Rumah Tangga Lain-lain	74
60	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	1
61	Bola Api	6
62	Tanaman Hias Leven Bangkok	10
63	Tanaman Hias Kamedunia	10

No	Nama Barang	Jumlah
64	Tanaman Hias Leven Palm Phoenix	5
65	Tanaman Hias Cemara Aentes	5
66	P.C Unit	146
67	Note Book	201
68	Personal Komputer Lain-lain	1
69	Hard Disk	13
70	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1
71	CPU	1
72	Printer	89
73	Scanner	9
74	Monitor	14
75	Printer	109
76	Scanner	4
77	External	17
78	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	75
79	Server	2
80	Hub	1
81	Peralatan Jaringan Lain-lain	22
82	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2
83	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	18
84	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	288
85	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	12
86	Meja Rapat Pejabat Eselon III	2
87	Meja Maket/Peta	1
88	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
89	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1
90	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	17
91	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	511
92	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	10
93	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	94
94	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	4
95	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	20
96	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	1
E.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	
1	Camera + Attachment	2
2	Proyektor + Attachment	41
3	Audio Logging Recorder	7
4	Microphone/Wireless Mic	4
5	Power Supply Microphone	5
6	Professional Sound System	2
7	Unintemuptible Power Supply (UPS)	33
8	Digital Audio Tape Recorder	1
9	Peralatan studio Visual Lain-lain	23

No	Nama Barang	Jumlah
10	Camera Electronic	28
11	Video Monitor	3
12	Camera Film	1
13	Lensa Kamera	2
14	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	20
15	Mesin Jilid	1
16	Compas Geologi	2
17	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain	10
18	Facsimile	2
19	Alat Komunikasi Lain-lain	2
F.	Alat Laboratorium	
1	Personal Komputer	5
2	Papan Panel	1
3	Layar	3
4	Pot Besar	30
5	Generator Set (Lab Scale)	3
6	Sum Invert Amplifier	1

Sumber: Bagian Umum Kepegawaian BAPPEDA, 2021

2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPEDA

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Perencanaan dan berdasarkan dokumen rencana Strategis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 kinerja layanan layanan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara diukur dan tertuang dalam sasaran strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA;

Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum dalam Renstra BAPPEDA periode tahun lalu (2017-2020), maka diketahui bahwa pada umumnya memiliki tingkat pencapaian kinerja yang baik

dan sesuai target yang diharapkan. Capaian layanan kinerja, dapat di sampaikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai koordinator sekaligus leading sektor urusan perencanaan telah berhasil dalam merencanakan dan mencapai target pembangunan. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara telah berhasil melaksanakan beberapa hal berikut:

1. Menyiapkan dokumen RKPD dengan kualitas yang baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan bermutu.
3. Menciptakan dan mengembangkan inovasi yang bermutu dalam bidang perencanaan di daerah.
4. Mewujudkan konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dengan permasalahan/isu strategis, terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis.
5. Berhasil mewujudkan kebijakan pembangunan daerah RKPD yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS), Sukses pencapaian sasaran strategis ini tergambar dengan di raihinya anugerah perencanaan pembangunan daerah (PPD) yang memang menjadi indikator pencapaian sasaran strategis ini.

2. Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah

Dengan menerapkan Pendekatan perencanaan Money Follow Program dengan Konsep “THIS” | Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, maka Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lembaga THINK TANK” di daerah, menjalankan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah perencanaan sekaligus Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan terhadap Perencanaan di wilayahnya. Dalam hal ini Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan Prioritas pembangunan daerah sehingga target capaian kinerja

pembangunan daerah yang telah tertuang dalam Dokumen RPJMD dan RKPD Tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata dapat tercapai.

Berdasarkan data hasil evaluasi, capaian sasaran ini selama tahun 2017-2019 mengalami tren positif, pencapaian target Prioritas pembangunan daerah dan target capaian kinerja pembangunan daerah yang telah tertuang dalam Dokumen RKPD dan Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara selama Tahun 2017-2020 rata-rata dapat tercapai.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda

Peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah (SAKIP) pada lingkup Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara diimplementasikan dalam bentuk keselarasan antar dokumen perencanaan, perencanaan kinerja berorientasi hasil, keterkaitan program/kegiatan dengan renstra, penyusunan indikator kinerja individu, pengukuran kinerja berjenjang, dan pemanfaatan pengukuran kinerja.

Capaian ini menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja organisasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan hasil yang baik. Hasil Penilaian evaluasi terhadap kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dilakukan dengan pendekatan melalui perbaikan standar belanja berbasis program yang berprinsip pada efisiensi, bukan pada serapan anggaran

Capaian dari sasaran tersebut diatas disajikan di Tabel 1 (TC.23) yang memuat capaian kinerja BAPPEDA empat tahun terakhir. Selain pencapaian kinerja BAPPEDA mulai Tahun 2017 sampai 2020, perlu disajikan juga kinerja pengelolaan keuangan BAPPEDA.

Tabel 2.TC.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2017-2020

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke-					Rasio capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				(60) B	(65) B	(70) BB	(75) BB	(82) A	34.60 (C)	79.61 (BB)	79.61 (BB)	84.22 (A)		57.67	100.00	100.00	100.00	
2	Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah				78.00	82.00	85.00	87.00	90.00	80	85.66	90.49	87.42		97.50	97.56	100.00	100.00	
3	Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah dalam skala Regional/Provinsi				5	3	2	1	1	-	1	1	1		-	100.00	100.00	100.00	
4	Persentase Konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD				93.00	95.00	98.00	99.00	100.00	94.00	99.51	99.70	100.00		98.94	98.95	100.00	100.00	
5	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam				86.00	90.00	93.00	95.00	97.00	86.07	88.67	86,29	78,33		99.92	95.63	95.34	100.00	

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke-					Rasio capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan				89.00	90.00	91.00	92.00	93.00	89.25	87.63	88,01	84,64		99.72	99.17	96.30	100.00	
7	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah				77.00	81.00	84.00	86.00	88.00	77.56	91.34	90,60	86,91		99.28	95.75	100.00	100.00	

Sumber : LkjIP Bappeda Tahun 2021

Dari total 7 (tujuh Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA, hampir seluruh target pada Renstra sudah tercapai, bahkan di beberapa Indikator Realisasi Capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kutai Kartanegara sangat baik.

2.4 PELAKSANAAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA

Anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Daya serap anggaran terhadap realisasi harus seimbang jangan sampai ada besar pasak daripada tiang. Berikut ini adalah gambaran anggaran dan realisasi belanja langsung BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 3 TC.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara realiasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Perencanaan	18,832,943,73 6.20	13,717,050,01 4.00	17,084,733, 517.00	20,207,780,09 8.00	30,739,332,331. 00	13,861,103, 282.00	10,600,10 3,129	14,120,62 2,914.00	17,154,45 4,774.00		73.60	77.28	82.65	84.89		16.95	10.39

Berdasarkan data yang ada sebagaimana disajikan pada Tabel 3 (TC.24) diketahui bahwa rasio anggaran dan realisasi belanja langsung BAPPEDA selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami tren peningkatan (positif) yaitu berkisar rata-rata 4 tahun terakhir sebesar 79,60%.

Dengan tingkat kinerja yang pada umumnya sangat tinggi dan disisi lain terdapat penyerapan anggaran yang belum optimal yang dijelaskan diatas, maka perlu dilakukan perbaikan pada tahap perencanaan dan penganggaran, sehingga penentuan target kinerja dapat berbanding lurus dengan pagu anggaran yang dibutuhkan. Diperlukan penghitungan pagu yang sesuai dengan standar satuan harga, sehingga perencanaan anggaran lebih efisien dan efektif.

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA

2.5.1 Tantangan

Dalam rangka pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Bappeda sebagai perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah memberi pelayanan dalam proses perencanaan dengan wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pembinaan dibidang perencanaan.

Tantangan yang dihadapi BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun kedepan (2021-2026) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Tuntutan integrasi perencanaan pembangunan daerah dari level nasional provinsi kabupaten desa.
2. Tuntutan masyarakat terhadap perbaikan proses perencanaan dan implementasinya.
3. Pengelolaan dan Penyajian data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan mutakhir.
4. Penyesuaian pembangunan berbasis new normal
5. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.
6. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja, dan database Bappeda.

Tantangan yang ada saat ini menjadi perhatian serius BAPPEDA dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan di Kutai Kartanegara.

2.5.2 Peluang

Disamping tantangan yang sudah disebutkan di atas, BAPPEDA juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan. Peluang yang harus dioptimalkan oleh BAPPEDA dalam melaksanakan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun yang akan datang, antara lain:

1. Rencana Pemindahan Ibukota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPD) Kementerian Dalam Negeri dalam upaya peningkatan aktifitas dan efisiensi proses perencanaan pembangunan daerah.
3. Memperkuat sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh organisasi Perangkat daerah dan seluruh stakeholder dalam rangka mewujudkan perencanaan yang berkualitas
4. Dukungan pembiayaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan berasal dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam perencanaan pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA

Permasalahan yang dihadapi organisasi saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi kedepan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan dapat dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak permasalahan yang ada.

Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah langkah kongkrit dalam implementasi pembangunan, dan strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI PELAYANAN

Organisasi Perangkat Daerah Bappeda berfungsi merumuskan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pengoordinasian, pembinaan bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAPPEDA Bappeda menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah
Belum Optimalnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang berorientasi pada pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah	Belum optimalnya penyelenggaraan dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah berbasis analisis hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1	Kebijakan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah belum terintegrasi dalam satu sistem
		2	Data-data pembangunan belum tersedia secara Real time sebagai dasar perumusan pengendalian dan evaluasi pembangunan
		3	Substansi pengendalian dan evaluasi belum dapat dijadikan sebagai rekomendasi perbaikan perencanaan pembangunan daerah
	Belum optimalnya capaian kinerja perangkat daerah dalam mendukung capaian sasaran daerah	1	masih rendahnya kapasitas sumber daya perencana di perangkat daerah
		2	Belum terbangunnya konsep kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder dalam pencapaian target perangkat daerah
		3	Pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah belum berjalan secara optimal

Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah
	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan kinerja aparatur	1	Belum optimalnya sistem dalam prosedur pelaporan, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
		2	Belum maksimalnya kapasitas dan tertib administrasi SDM Aparatur
		3	Belum optimalnya dukungan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, & PROGRAM KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Telaahan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam hal ini visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tersebut. visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode keempat RPJPD Kabupaten Kutait kartanegara Tahun 2005-2025, dimana tema pembangunan periode keempat ini menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara terpilih adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

SEJAHTERA:

Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan.

BERBAHAGIA:

Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman, diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian dan gotong royong, berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Upaya mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. **Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani**
 Dengan sasaran kebijakan pembangunan pada Penguatan Reformasi Birokrasi, Perbaikan Kualitas Layanan publik, Fasilitas Kesejahteraan ASN, dan Penerapan Kerjasama Pemerintah Daerah
2. **Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya**
 Dengan sasaran kebijakan pembangunan pada peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kualitas Layanan Kesehatan, Kompetensi Tenaga Kerja, Kualitas Layanan Kesejahteraan Sosial dan Pelestarian Budaya Daerah
3. **Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
 Dengan sasaran kebijakan pada pembangunan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas, Optimalisasi Potensi Wisata ALAM, SEJARAH DAN BUDAYA, dan Pengembangan UMKM
4. **Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah**
 Dengan sasaran kebijakan pada pembangunan Infrastruktur Wilayah, Perumahan, Air Bersih, dan Energi
5. **Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan**
 Dengan sasaran kebijakan pada pembangunan Pembangunan Daerah berbasis Lingkungan Hidup Yang Lestari

Dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, ditetapkan sejumlah 6 tujuan pembangunan daerah dengan 8 indikator kinerja tujuan. Dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 16 sasaran pembangunan daerah dengan 20 indikator sasaran. Selanjutnya juga telah ditetapkan 8 strategi dan 20 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut. Terkait visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, salah satu fungsi Bappeda adalah “Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati”. Maka dalam perumusan kebijakan perencanaan strategis pembangunan daerah diarahkan pada perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Dalam mengupayakan terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, secara umum Bappeda memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian kelima misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Bappeda mendukung pencapaian Misi pertama, yaitu “Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”. Dalam mewujudkan Misi 1 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan (Tujuan 1 RPJMD), yaitu meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi”. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut terdapat 3 sasaran pembangunan yaitu (1) meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP kabupaten. (2). Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator sasaran Indeks Persepsi Anti Korupsi. (3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indeks persepsi dengan indikator sasaran kualitas pelayanan publik. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung sasaran 1 yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pelayanan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pencapaian Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dapat dijelaskan dalam Tabel berikut.

Tabel 5. Pelayanan Bappeda terhadap pencapaian Visi dan Sasaran RPJMD Kab.Kutai Kartanegara

Misi dan Sasaran RPJMD yang terkait dengan Peran Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
MISI-1 Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP kabupaten	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional dan Provinsi (Forum Trilateral Desk) setiap tahun dalam rangka sinkronisasi sasaran dan prioritas nasional-daerah.
		Dukungan Sistem Informasi Perencanaan dan Sistem Informasi Pengendalian
		Integrasi Sistem Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah
	Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan	Semakin strategisnya peran perencanaan sebagai tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan

Misi dan Sasaran RPJMD yang terkait dengan Peran Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
		Pemantauan perencanaan pembangunan yang didukung Sistem (e-pantau) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian setiap triwulan untuk mengendalikan dan memantau konsistensi Perangkat Daerah terhadap perencanaan pembangunan Kerjasama Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Universitas/ Institusi pendidikan tinggi dalam mengawal perencanaan sebagai pendamping perangkat daerah
	Ketergantungan pada pihak diluar instansi perencana dalam penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan	Digitalisasi dan Kebijakan data (Satu Data). (Satu Data Kukar) mendukung sinkronisasi data statistik statistik/ sektoral
	Masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan kinerja aparatur SDM Perencana, disebabkan manajemen ASN belum berdasar pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi	Kebijakan peningkatan dan penguatan kapasitas SDM Bappeda

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN TELAAHAN RENSTRA PROVINSI

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026 maka perlu juga dilakukan penyelarasan dan sinkronisasi antara Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Renstra Perangkat Daerah (PD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan tujuan dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu telaah terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah (PD) Provinsi Tahun Rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan peluang pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan dan pilihan Kebijakan Strategis dalam Renstra Perangkat Daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan Daerah

3.3.1 Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Telaah terhadap Dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas dilakukan mengingat Bappeda mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam Perencanaan Pembangunan. Dalam Renstra Bappenas Tahun 2020-2024 dicantumkan bahwa Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi instansi yang berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas.

Berdasarkan hal tersebut maka, sebagai perangkat daerah yang berperan sebagai koordinator penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di daerah yang berkualitas, maka Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara perlu merujuk tujuan dari BAPPENAS dalam proses perencanaan pembangunan agar kualitas kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan, dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah, serta upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi dapat berjalan dengan optimal.

Tabel 6. Pelayanan PD Bappeda berdasarkan Telaah Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS.

No	Sasaran Renstra BAPPENAS	Implikasi terhadap Pelayanan Bappeda
1	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.	Penguatan dan pendampingan proses perencanaan kepada seluruh perangkat Daerah dan stakeholder dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas
2	Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.	Optimalisasi inovasi perencanaan pembangunan
3	Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah

3.3.2 Telaahan Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

Sebagai perangkat daerah yang berperan dalam koordinator urusan perencanaan di level Propinsi, maka Bappeda Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tujuan dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien melalui penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Sebagai koordinator perencanaan, BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur, menyusun strategi dan kebijakan yang pro-pembangunan daerah sehingga tetap berjalan sesuai koridor perencanaan pembangunan. Penyusunan strategi dan kebijakan melibatkan stakeholder dalam hal koordinasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Pemerintah Provinsi maupun di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Secara umum berdasarkan telaah terhadap dokumen Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur, terdapat beberapa kata kunci dari sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah di level propinsi Kalimantan Timur adalah perencanaan yang berkualitas baik dari segi konsistensi, pengendalian dan evaluasi dan ketersediaan data yang mutakhir sebagai input proses perencanaan pembangunan itu sendiri. Berikut ini adalah identifikasi permasalahan pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan sasaran Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya.

Tabel 7. Pelayanan PD Bappeda berdasarkan Telaah Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran Renstra BAPPEDA Prov.Kaltim	Implikasi terhadap Pelayanan Bappeda
1	Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota	Penguatan Peran Bappeda sebagai leading sektor perencanaan pembangunan daerah dan komitmen seluruh stakeholder dalam forum trilateral desk antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota
2	Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah	Penguatan Kualitas evaluasi dan pengendalian yang terintegrasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi
3	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Penguatan basis data yang mutakhir dan responsif sebagai bahan perencanaan pembangunan

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Terkait dengan rencana tata ruang wilayah, saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Kukar Tahun 2013-2032, namun sejalan dengan perkembangan dinamika pembangunan dan dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai Ibukota Negara (IKN), maka Kabupaten Kutai Kartanegara masuk dalam Delineasi Wilayah Rencana IKN tersebut sehingga perlu dilakukan Revisi RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara dan hal ini sesuai dengan UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang bahwa RTRW Kabupaten bisa ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun. Dengan adanya hal tersebut, maka telaah terhadap Rencana tata ruang wilayah tidak dilakukan mengingat saat dokumen rencana strategis ini dibuat, proses revisi RTRW kabupaten Kutai Kartanegara juga sedang berjalan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan di Kutai Kartanegara telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yakni: (a) saling ketergantungan (interdependency), yaitu saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem; (b) prinsip keseimbangan (equilibrium), yaitu keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup/ekologi; dan (c) prinsip keadilan (justice) yaitu keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah.

KLHS RPJMD yang disusun difokuskan pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengakomodir isu strategis pembangunan

berkelanjutan dalam pilar sosial, ekonomi, lingkungan hidup, serta hukum dan tata kelola.

Identifikasi isu strategis pada KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara didasari oleh penilaian terhadap kondisi sebagai berikut:

1. Berpotensi menimbulkan lingkungan hidup dan sosial ekonomi yang relevan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama kemacetan, persampahan, konversi lahan, gentrifikasi, PKL, dan nilai hidup dan budaya
2. Mempunyai relevansi untuk dapat segera diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun untuk meminimalisir dampak kumulatif yang lebih luas
3. Menyangkut hajat hidup orang banyak atau khalayak (pemangku kepentingan)

Selaras dengan prinsip KLHS dan dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Bappeda yang memiliki fungsi menyusun, mengoordinasikan, membina perencanaan dan pengendalian pembangunan, perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran pembangunan yang direncanakan.

Tabel 8. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar
1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Sosial
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Sosial
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Sosial
5	Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Sosial
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Lingkungan
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Ekonomi
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Ekonomi
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneagra	Ekonomi
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Lingkungan

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Lingkungan
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Lingkungan
14	Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	Lingkungan
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Lingkungan
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Hukum dan Tata Kelola
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Ekonomi

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis dalam dokumen ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di masa datang.

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan dalam penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, yaitu:

1. Kualitas sumber daya perencana yang menguasai IT
2. Kesiapan dokumen perencanaan Pemindahan IKN di Prov. Kalimantan Timur

3. Penyajian data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan mutakhir.
4. Responsif terhadap Perubahan Regulasi Pembangunan daerah.
5. Responsif terhadap pengembangan wilayah
6. Tuntutan integrasi perencanaan pembangunan daerah dari level nasional provinsi kabupaten desa.
7. Penyesuaian pembangunan berbasis new normal

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang dalam tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun.

4.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Penetapan tujuan dalam Renstra selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

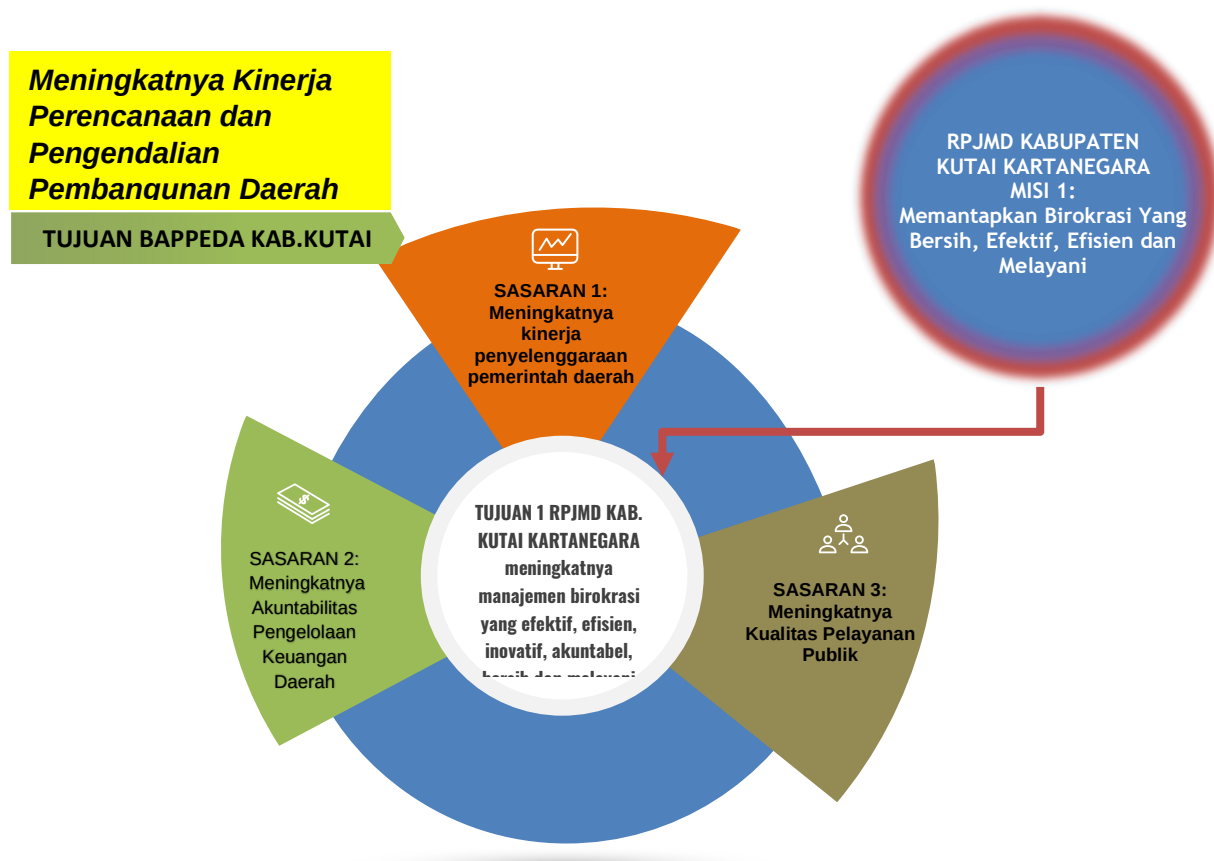
Sesuai dengan Misi ke-1 yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2021-2026 yaitu “**Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani**” yang kemudian diturunkan dalam Tujuan meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani dalam 3 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP kabupaten.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator sasaran Indeks Persepsi Anti Korupsi.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks persepsi kualitas pelayanan publik.

Maka pada logframe perencanaan integratif untuk pencapaian Misi 1 (satu) dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, dapat dilihat bahwa BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada posisi tugas yang sesuai

dengan sasaran ke-1 RPJMD dan di “Cascading” menjadi Tujuan dari BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu ***Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah*** dengan indikator kinerja ***Rata-rata capaian indikator tujuan daerah***

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD maka dilakukan perumusan perencanaan terintegrasi yang tergambar dalam logical framework sebagai berikut:



Gambar 5.Keterkaitan Tujuan Bappeda dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

4.2 SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan

Berdasarkan rumusan tujuan yang ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Renstra BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, sebagai berikut:

**“Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian
Pembangunan Daerah”**

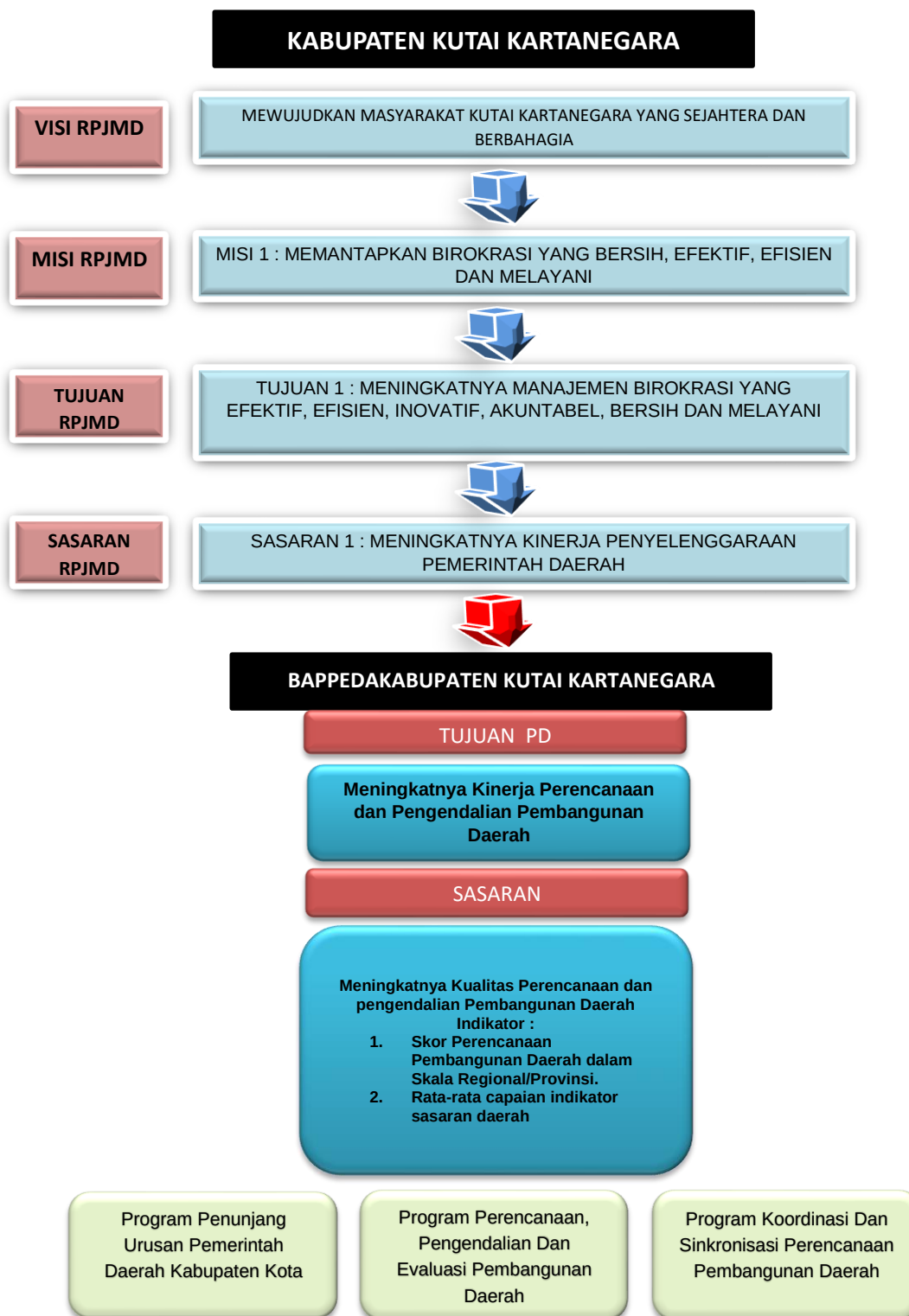
Tujuan dan sasaran BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 lebih rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Tabel. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KETERANGAN
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Rata-rata capaian indikator tujuan daerah	75	85	87	90	93	Indikator Tujuan
	1.1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,20 (1)	2,30 (1)	2,40 (1)	2,50 (1)	2,60 (1)	Indikator Kinerja Utama
		Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	94.00	95,00	96.00	96.50	97.00	Indikator Kinerja Utama

Dalam sasaran terdapat Indikator terukur yang menjadi **Indikator Kinerja Utama** (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai indikator yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Keterkaitan secara linieritas Tujuan dan Sasaran perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 6..Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran RPJMD dan Renstra Bappeda

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026 dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan, isu strategis dan peluang yang telah diidentifikasi pada bab-bab sebelumnya.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari yang di emban Bappeda Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Casacading Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah INDIKATOR: Rata-rata capaian indikator tujuan daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	1 Skor Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Skala Regional/Provinsi.	Penguatan kualitas perencanaan yang konsisten, komprehensif, serta terukur berbasis pengendalian dan evaluasi	Integrasi perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah secara sinergi dalam pendekatan holistic-integratif
				Pengembangan basis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan kewilayahan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah
				Penguatan pengendalian dan evaluasi sebagai dasar perumusan perencanaan pembangunan daerah
		2 Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	Penguatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan	Penguatan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi dimasing-masing perangkat daerah secara periodik dan berkelanjutan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Penyediaan dokumen perencanaan pendukung pencapaian program dedikasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Penguatan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi dimasing-masing perangkat daerah secara periodik dan berkelanjutan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
				Penyediaan dokumen perencanaan pendukung pencapaian program dedikasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
				Penguatan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi dimasing-masing perangkat daerah secara periodik dan berkelanjutan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
				Penyediaan dokumen perencanaan pendukung pencapaian program dedikasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara merujuk pada Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan menteri dalam negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klarifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Lebih dari itu rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan dan sebagai koordinator perencanaan pembangunan di daerah. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka menengah kedepan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 11. T.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera ngan
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mening katnya Kinerja Perenc anaan dan Penge ndalian Pemba nguna n Daerah	Meningka tnya Kualitas Perencana an dan pengenda lian Pembang uman Daerah		Rata-rata capaian indikator tujuan daerah			n/a	75,00		85,00		87,00		90,00		93,00		93,00		Kabupate n		
		Program Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah Kabupate n Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah		Nilai	A (84,22)	87,00 (A)	24.999.174.778	88,00 (A)	25.252.620.453	88,50 (A)	25.225.196.453	88,85 (AA)	25.604.157.693	90,00 (AA)	25.275.196.453	90,00 (AA)	126.356.345.830	Sekretaris		
		Perencan aan, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dokum en	12	12	550.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	13	550.000.000	61	2.600.000.000	Kasubag Penyusun an Program dan Keuangan		

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perang kat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera ngan
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Penyusun an Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokum en	5	5	250.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	6	250.000.000	26	1.100.000.000	Kasubag Penyusun an Program dan Keuangan	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Koordinasi dan Penyusun an Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Dokumen RKA-SKPD		dokum en	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	20	250.000.000	Kasubag Penyusun an Program dan Keuangan	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Koordinasi dan Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		dokum en	2	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	10	750.000.000	Kasubag Penyusun an Program dan Keuangan	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dokum en	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	Kasubag Penyusun an Program dan Keuangan	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		Lapora n	6	6	17.042.630.290	6	17.752.943.365	6	17.752.943.365	6	17.752.943.365	6	17.752.943.365	30	88.054.403.750	Kasubag Penyusun an Program dan Keuangan		
		Penyediaa n Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan		Orang/ Bulan	1.668	1.668	16.708.770.490	1.668	17.419.083.565	1.668	17.419.083.565	1.668	17.419.083.565	1.668	17.419.083.565	8.340	86.385.104.750	Kasubag Penyusun an Program dan Keuangan	Kab. Kuta i Kart ane gara	

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera ngan
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Koordinasi dan Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD		Lapora n	5	5	308.859.800	5	308.859.800	5	308.859.800	5	308.859.800	5	308.859.800	25	1.544.299.000	Kasubag Penyusun an Program dan Keuangan	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Penyusun an Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Lapora n	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	125.000.000	Kasubag Penyusun an Program dan Keuangan	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		dokum en	6	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	30	1.250.000.000	Kasubag Penyusun an Program dan Keuangan		
		Penyusun an Perencana an Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan an Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		dokum en	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000	Kasubag Penyusun an Program dan Keuangan	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Pembinaa n, Pengawas an, dan Pengendali an Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian		Lapora n	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000	Kasubag Penyusun an Program dan Keuangan	Kab. Kuta i Kart ane gara	

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera ngan
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Rekonsilia si dan Penyusun an Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang di rekonsiliasi		Lapora n	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000	Kasubag Penyusun an Program dan Keuangan	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Penatausa haan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Penatausaha an		Lapora n	3	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	15	500.000.000	Kasubag Penyusun an Program dan Keuangan	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Administ rasi Kepegaw aian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaia n		dokum en	5	8	650.000.000	8	500.000.000	8	500.000.000	8	650.000.000	8	500.000.000	40	2.800.000.000	Kasubag Kepegaw aian		
			Jumlah Pakaian		Stel		145		-		-		145		-		290				
			Jumlah ASN		Orang	50	60		60		60		60		60		300				
		Pengadaa n Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya yang diadakan		stel	n.a	145	150.000.000	0	0	0	0	145	150.000.000	0		290	300.000.000	Kasubag Kepegawa ian	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Pendataan dan Pengolaha n Administra si Kepegawa ian	Jumlah Laporan Data Data Pegawai		Lapora n	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	20	125.000.000	Kasubag Kepegawa ian	Kab. Kuta i Kart ane gara	

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perang kat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera n
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	JumlahLapora n Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Lapora n	1	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	20	375.000.000	Kasubag Kepegawa ian	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Bimbingan Teknis Implement asi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		orang	50	60	400.000.000	60	400.000.000	60	400.000.000	60	400.000.000	60	400.000.000	300	2.000.000.000	Kasubag Kepegawa ian	Kab. Kuta i Kart ane gara	Dukung an terhada p progra m dedikas i KUKAR BEBAY A
		Administr asi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Layana n	9	8	1.800.000.000	8	1.804.901.800	8	1.804.901.800	8	1.804.901.800	8	1.754.901.800	40	8.969.607.200	Kasubag Umum dan Tata Laksana		
		Penyediaa n Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		jenis	48	48	200.000.000	48	200.000.000	48	200.000.000	48	200.000.000	48	200.000.000	240	1.000.000.000	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Penyediaa n Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik		jenis	9	9	450.000.000	9	450.000.000	9	450.000.000	9	450.000.000	9	450.000.000	45	2.250.000.000	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kuta i Kart ane gara	
			Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan		Kotak	3.350	3.350		3.350		3.350		3.350		3.350		16.750	0	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kuta i Kart ane gara	
			Makanan dan Minuman Jamuan Tamu yang disediakan		Kotak	2.090	2.090		2.090		2.090		2.090		2.090		10.450	0	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Penyediaa n Barang Cetakan dan	Jumlah Cetakan		Eksem plar	1.013	1.013	100.000.000	950	94.901.800	950	94.901.800	950	94.901.800	950	94.901.800	4.813	479.607.200	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kuta i Kart	

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perang kat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera ngan
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Penggang aan																		ane gara	
			Jumlah penggandaan		Lembar	50.130	50.130	-	5.100		5.100		5.100		5.100		70.530	0	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kutai i Kart ane gara	
			Jumlah Cetakan Kalender		Buah	174	174	-	200		200		200		200		974	0	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kutai i Kart ane gara	
		Penyediaa n Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	Jumlah bacaan yang disediakan		Eksem plar	2.493	2.493	100.000.000	2.500	100.000.000	2.500	100.000.000	2.500	100.000.000	2.500	100.000.000	12.493	500.000.000	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kutai i Kart ane gara	
			Jumlah Kontrak Advetorial		Kali	2	2	-	2		2		2		2		10	0	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kutai i Kart ane gara	
		Penyediaa n Bahan/Mat erial	Jumlah Jenis Bahan/Materi al yang disediakan		Jenis	15	20	50.000.000	20	45.000.000	20	45.000.000	20	45.000.000	20	45.000.000	100	230.000.000	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kutai i Kart ane gara	
		Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan		Orang/ Kali	150	150	700.000.000	165	750.000.000	165	750.000.000	165	750.000.000	150	700.000.000	795	3.650.000.000	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kutai i Kart ane gara	
		Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) dan Arsip pada unit kearsipan (UK)		Berkas	65	65	100.000.000	65	100.000.000	65	100.000.000	65	100.000.000	65	100.000.000	325	500.000.000	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kutai i Kart ane gara	
		Dukungan Pelaksana an Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah		Aplikasi	1	1	100.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	5	360.000.000	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kutai i Kart ane gara	

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perang kat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera n
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		Persen	100	100	582.628.036	100	347.500.000	100	297.500.000	100	476.461.240	100	197.500.000	100	1.901.589.276	Kasubag Umum dan Tata Laksana		
		Pengadaa n Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan		Unit	14	-	-	-	-	-	-	5	228.961.240	-	-	5	228.961.240	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor		Unit	18	18	582.628.036	18	347.500.000	16	297.500.000	14	247.500.000	12	197.500.000	78	1.672.628.036	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Penyediaan Jasa Penunjan g Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		Bulan	12	12	2.272.313.550	12	2.272.313.550	12	2.272.313.550	12	2.272.313.550	12	2.272.313.550	60	11.361.567.750	Kasubag Umum dan Tata Laksana		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		bulan	12	12	1.521.900.000	12	1.521.900.000	12	1.521.900.000	12	1.521.900.000	12	1.521.900.000	60	7.609.500.000	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		bulan	12	12	750.413.550	12	750.413.550	12	750.413.550	12	750.413.550	12	750.413.550	60	3.752.067.750	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kuta i Kart ane gara	
			Jumlah Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS		bulan	12	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	60	-	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kuta i Kart ane gara	

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perang kat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera ngan
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Pemelihaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta h daerah	Persentase Pemeliharaaa n barang milik daerah		Persen	100	100	1.851.602.902	100	1.824.961.738	100	1.847.537.738	100	1.897.537.738	100	1.997.537.738	100	9.419.177.854	Kasubag Umum dan Tata Laksana		
		Penyediaa n Jasa Pemelihaan, Biaya Pemelihaan dan Pajak Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2		Unit	15	15	354.502.820	15	239.429.620	15	239.429.620	15	239.429.620	15	239.429.620	75	1.312.221.300	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kuta i Kart ane gara	
			Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4		Unit	6	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	30	-	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Penyediaa n Jasa Pemelihaan, Biaya Pemelihaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasion al atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2		Unit	25	25	233.002.620	25	233.002.620	25	233.002.620	25	233.002.620	25	233.002.620	125	1.165.013.100	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kuta i Kart ane gara	
			Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4		Unit	3	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	15	-	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Pemelihaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara		unit	n.a	0	-	0	-	0	-	0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kuta i Kart	

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera ngan
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																				ane gara	
		Pemelihar aan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi		Kali	36	36	544.668.802	36	633.100.838	36	655.676.838	36	705.676.838	36	755.676.838	180	3.294.800.154	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Pemelihar aan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi		Kali	132	132	719.428.660	132	719.428.660	132	719.428.660	132	719.428.660	132	719.428.660	660	3.597.143.300	Kasubag Umum dan Tata Laksana	Kab. Kuta i Kart ane gara	
	Meningka tnya Kualitas Perencan aan dan pengenda lian Pembang unan Daerah		Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah			2,111	2,20		2,30		2,40		2,50		2,60		2,60		Kepala Bappeda		
			Rata-rata capaian indikator sasaran daerah			n.a	94,00		95,00		96,00		96,50		97,00		97,00		Kepala Bappeda		

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perang kat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera ngen
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		PROGRA M PERENCA NAAN, PENGEN DALIAN DAN EVALUAS I PEMBANG UNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah		Persen	n.a	100	4.162.400.000	100	4.212.400.000	100	4.212.400.000	100	4.212.400.000	100	4.212.400.000	100	21.012.000.000	Kabid Perencan aan Pengenda lian dan Evaluasi Pembang unan Daerah		
		Penyusun an Perencan aan dan Pendanaa n	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		dokum en	24	24	1.825.000.000	24	2.125.000.000	24	2.125.000.000	24	2.125.000.000	27	2.125.000.000	123	10.325.000.000	Kabid Perencan aan Pengenda lian dan Evaluasi Pembang unan Daerah		
			Jumlah Pendamping an perencanaan		OPD	58	58		58		58		58		58		290				
			Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik		Kali	2	2		2		2		2		2		10				
			Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Linta s Perangkat Daerah		Forum	3	3		3		3		3		3		15				
			Jumlah pelaksanaan Musrenbang		Kali	2	2		2		2		2		2		10				
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalah	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi		dokum en	2	1	300.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	5	2.700.000.000	Kasubid Perencana an Pembangu	Kab. Kuta i Kart	

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perang kat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera ngan
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		han, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																nan daerah	ane gara	
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Pendampingan perencanaan		OPD	58	58	400.000.000	58	400.000.000	58	400.000.000	58	400.000.000	58	240.000.000	290	1.840.000.000	Kasubid Perencanaan Pembangunan daerah	Kab. Kutai Kartane gara	Dukung an terhadap p rogram dedikas i KUKAR BEBAY A
			Jumlah Dokumen Integrasi TJSP		dokumen	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	0	Kasubid Perencanaan Pembangunan daerah	Kab. Kutai Kartane gara	
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik		Kali	2	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	5	450.000.000	Kasubid Perencanaan Pembangunan daerah	Kab. Kutai Kartane gara	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Forum	3	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	15	225.000.000	Kasubid Perencanaan Pembangunan daerah	Kab. Kutai Kartane gara	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten /Kota	Jumlah pelaksanaan Musrenbang		Kali	2	1	90.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	2	250.000.000	6	910.000.000	Kasubid Perencanaan Pembangunan daerah	Kab. Kutai Kartane gara	
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		dokumen	18	18	200.000.000	18	200.000.000	18	200.000.000	18	200.000.000	18	200.000.000	90	1.000.000.000	Kasubid Perencanaan Pembangunan daerah	Kab. Kutai Kartane gara	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati (RPJMD,RKPD dan		dokumen	3	4	700.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	7	700.000.000	23	3.200.000.000	Kasubid Perencanaan Pembangunan daerah	Kab. Kutai Kartane gara	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelompok Sasaran	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Keterangan
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota	Perubahan RKPD)																		
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah		dokumen	4	5	1.434.900.000	5	1.034.900.000	5	1.034.900.000	5	1.034.900.000	5	1.034.900.000	25	5.574.500.000	Kasubid Perencanaan Pembangunan daerah		
			Jumlah pendampingan ketersediaan data		urusan	32	32		32		32		32		32		160		Kasubid Perencanaan Pembangunan daerah		
			Jumlah layanan data dan informasi kecamatan		layanan data dan informasi	n.a	1		1		6		9		12		29		Kasubid Perencanaan Pembangunan daerah		
			Jumlah Rancangan Regulasi Daerah		Rancangan Regulasi Daerah	n.a	1		0		0		0		0		1		Kasubid Perencanaan Pembangunan daerah		
			Jumlah Personil Pembinaan Data		Orang	n.a	30		30		30		30		30		150		Kasubid Perencanaan Pembangunan daerah		
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen (Data Bidang Perencanaan)		dokumen	3	3	802.500.000	3	452.500.000	3	452.500.000	3	452.500.000	3	452.500.000	15	2.612.500.000	Kasubid Perencanaan Pembangunan daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Dukungan terhadap program dedikasi (DISAP A) & Kesejahteraan Sosial IDAMANN
			Jumlah Dokumen		dokumen	n.a	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5			Kab. Kutai	

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perang kat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera ngen
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			analisis data Kemiskinan																	i Kart ane gara	
		Pembinaa n dan Pemanfaat an Data dan Informasi Perencana an Pembangu nan SKPD	Jumlah Pendampinga n ketersediaan data (32 Urusan)		urusan	32	32	530.000.000	32	480.000.000	32	480.000.000	32	480.000.000	32	480.000.000	160	2.450.000.000	Kasubid Perencana an Pembangu nan daerah	Kab. Kutai i Kart ane gara	Dukung an terhada p progra m dedikas i (DISAP A)
			Jumlah layanan data dan informasi kecamatan		layanan data dan informa si	n.a	1	-	1	-	6	-	9	-	12	-	29	0	Kasubid Perencana an Pembangu nan daerah	Kab. Kutai i Kart ane gara	
			Jumlah Rancangan Regulasi Daerah		Rancan gan Regula si	n.a	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	0	Kasubid Perencana an Pembangu nan daerah	Kab. Kutai i Kart ane gara	
			Jumlah Personil Pembinaan Data		Orang	n.a	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	150	0	Kasubid Perencana an Pembangu nan daerah	Kab. Kutai i Kart ane gara	
		Penyusun an Profil Pembangu nan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen Penyusunan Profil Pembanguna n Daerah Kabupaten/Ko ta		dokum en	1	1	102.400.000	1	102.400.000	1	102.400.000	1	102.400.000	1	102.400.000	5	512.000.000	Kasubid Perencana an Pembangu nan daerah	Kab. Kutai i Kart ane gara	Dukung an terhada p progra m dedikas i (DISAP A)

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perang kat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera ngen
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Pengenda lian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencnan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalia n, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		dokum en	13	12	902.500.000	13	1.052.500.000	13	1.052.500.000	13	1.052.500.000	13	1.052.500.000	64	5.112.500.000	Kasubid Evaluasi dan Pengenda lian		
		Koordinasi Pengendali an Perencana an dan Pelaksana an Pembangu nan Daerah di Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		dokum en	8	8	202.500.000	8	202.500.000	8	202.500.000	8	202.500.000	8	202.500.000	40	1.012.500.000	Kasubid Evaluasi dan Pengendali an	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Pengendali an Pelaksana an Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		dokum en	1	-	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	600.000.000	Kasubid Evaluasi dan Pengendali an	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Monitoring ,Evaluasi dan Penyusun an Laporan Berkala Pelaksana an Pembangu nan Daerah	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		dokum en	4	4	700.000.000	4	700.000.000	4	700.000.000	4	700.000.000	4	700.000.000	20	3.500.000.000	Kasubid Evaluasi dan Pengendali an	Kab. Kuta i Kart ane gara	

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera ngen
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		PROGRA M KOORDIN ASI DAN SINKRONI SASI PERENCA NAAN PEMBAN GUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintaha n pada Renja-PD		Persen	n.a	100	2.996.749.440	100	3.109.249.440	100	3.109.249.440	100	3.109.249.440	100	3.109.249.440	100	15.433.747.200	Kabid Perencana aan Sosial Budaya dan Pemerinta han		
			Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD		Persen	n.a	100		100		100		100		100		100		Kabid Perencana aan Ekonomi dan Sumber Daya Alam		
			Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembang an Wilayah pada Renja-PD		Persen	n.a	100		100		100		100		100		100		Kabid Perencana aan Sarana dan Prasarana Pengemb an Wilayah		
		Koordina si Perencana aan Bidang Pemerinta han dan Pembang unan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintaha n dan Pembanguna n Manusia		dokum en	79	75	1.236.750.000	75	1.176.750.000	75	1.176.750.000	75	1.176.750.000	75	1.176.750.000	375	5.943.750.000	Kabid Perencana an Sosial Budaya dan Pemerinta han		

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perang kat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera ngan
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Koordinasi Penyusun an Dokumen Perencana an Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)		dokum en	13	11	115.000.000	11	115.000.000	11	115.000.000	11	115.000.000	11	115.000.000	55	575.000.000	Kasubid Perencana an Pemerintahan	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Asistensi Penyusun an Dokumen Perencana an Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		dokum en	13	11	100.000.000	11	70.000.000	11	70.000.000	11	70.000.000	11	70.000.000	55	380.000.000	Kasubid Perencana an Pemerintahan	Kab. Kuta i Kart ane gara	Dukung an terhada p progra m dedikas i Progra m Kukar Bebaya
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi		dokum en	n.a	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5			Kab. Kuta i Kart ane gara	

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perang kat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera ngan
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Pelaksana an Monitoring dan Evaluasi Penyusun an Dokumen Perencana an Pembangu nan Perangkat Daerah Bidang Pemerinta han	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perang kat Daerah Bidang Pemerintahan		dokum en	13	11	70.000.000	11	70.000.000	11	70.000.000	11	70.000.000	11	70.000.000	55	350.000.000	Kasubid Perencana an Pemerinta han	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Koordinasi Pelaksana an Sinergitas dan Harmonisa si Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang Pemerinta han	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		dokum en	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5	1.250.000.000	Kasubid Perencana an Pemerinta han	Kab. Kuta i Kart ane gara	

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perang kat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera ngan
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Koordinasi Penyusun an Dokumen Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang Pembangu nan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		dokum en	12	12	236.750.000	12	236.750.000	12	236.750.000	12	236.750.000	12	236.750.000	60	1.183.750.000	Kasubid Perencana an Pembangu nan Manusia	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Asistensi Penyusun an Dokumen Perencana an Pembangu nan Perangkat Daerah Bidang Pembangu nan Manusia	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		dokum en	12	12	100.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	60	380.000.000	Kasubid Perencana an Pembangu nan Manusia	Kab. Kuta i Kart ane gara	Dukung an terhada p progra m dedikas i Progra m Kukar Bebaya
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi		dokum en	n.a	1		1		1		1		1		5			Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Pelaksana an Monitoring dan Evaluasi Penyusun an Dokumen Perencana an Pembangu nan Perangkat Daerah Bidang Pembangu	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		dokum en	12	12	115.000.000	12	115.000.000	12	115.000.000	12	115.000.000	12	115.000.000	60	575.000.000	Kasubid Perencana an Pembangu nan Manusia	Kab. Kuta i Kart ane gara	

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perang kat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera ngan
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		nan Manusia																			
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		dokumen	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5	1.250.000.000	Kasubid Perencanaan Pembangunan Manusia	Kab. Kutai Kartane gara	Dukung an terhadap p rogram dedikas i Prog. Keseja hteraan Sosial IDAMA N
			Jumlah Dokumen Pendukung Kebijakan Kemiskinan		dokumen	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	10		Kasubid Perencanaan Pembangunan Manusia	Kab. Kutai Kartane gara	
		Koordina si Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomia n dan SDA (Sumber Daya Alam)		dokumen	35	37	880.000.000	37	977.500.000	37	977.500.000	37	977.500.000	37	977.500.000	185	4.790.000.000	Kabid Perencanaan Perekono mian dan SDA		

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perang kat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera ngan
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Koordinasi Penyusun an Dokumen Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang Perekono mian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomia n (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		dokum en	6	6	67.500.000	6	67.500.000	6	67.500.000	6	67.500.000	6	67.500.000	30	337.500.000	Kasubid Perencana an Perekono mian	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Asistensi Penyusun an Dokumen Perencana an Pembangu nan Perangkat Daerah Bidang Perekono mian	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan n Perangkat Daerah Bidang Perekonomia n		dokum en	6	6	100.000.000	6	92.500.000	6	92.500.000	6	92.500.000	6	92.500.000	30	470.000.000	Kasubid Perencana an Perekono mian	Kab. Kuta i Kart ane gara	Dukung an terhada p progra m dedikas i Progra m Kukar Bebaya
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi		dokum en	n.a	1		1		1		1		1		5			Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Pelaksana an Monitoring dan Evaluasi Penyusun an Dokumen Perencana an Pembangu nan Perangkat Daerah Bidang Perekono mian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan n Perangkat Daerah Bidang Perekonomia n		dokum en	6	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	30	1.000.000.000	Kasubid Perencana an Perekono mian	Kab. Kuta i Kart ane gara	

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera ngan
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		dokumen	1	1	33.750.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	5	393.750.000	Kasubid Perencanaan Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		dokumen	5	5	90.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000	25	450.000.000	Kasubid Perencanaan Sumber Daya Alam	Kab. Kutai Kartanegara	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		dokumen	5	5	100.000.000	5	92.500.000	5	92.500.000	5	92.500.000	5	92.500.000	25	470.000.000	Kasubid Perencanaan Sumber Daya Alam	Kab. Kutai Kartanegara	Dukung an terhadap progra m dedikas i Progra m Kukar Bebaya

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perang kat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera ngen
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi		dokum en	n.a	1		1		1		1		1		5			Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Pelaksana an Monitoring dan Evaluasi Penyusun an Dokumen Perencana an Pembangu nan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang SDA		dokum en	5	5	255.000.000	5	255.000.000	5	255.000.000	5	255.000.000	5	255.000.000	25	1.275.000.000	Kasubid Perencana an Sumber Daya Alam	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Koordinasi Pelaksana an Sinergitas dan Harmonisa si Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang SDA		dokum en	1	1	33.750.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	5	393.750.000	Kasubid Perencana an Sumber Daya Alam	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Koordina si Perencana an Bidang Infrastruk tur dan Kewilayah an	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		dokum en	71	70	879.999.440	70	954.999.440	70	954.999.440	70	954.999.440	70	954.999.440	350	4.699.997.200	Kabid Perencana an Sarana dan Prasarana Pengemb anan Wilayah		

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perang kat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera ngan
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Koordinasi Penyusun an Dokumen Perencana an Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		dokum en	5	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	20	225.000.000	Kasubid Perencana an Infrastruktur	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Asistensi Penyusun an Dokumen Perencana an Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan n Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		dokum en	5	4	100.000.000	4	92.500.000	4	92.500.000	4	92.500.000	4	92.500.000	20	470.000.000	Kasubid Perencana an Infrastruktur	Kab. Kuta i Kart ane gara	Dukung an terhada p progra m dedikas i Progra m Kukar Bebaya
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi		dokum en	n.a	1		1		1		1		1		5			Kab. Kuta i Kart ane gara	

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perang kat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera ngan
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Pelaksana an Monitoring dan Evaluasi Penyusun an Dokumen Perencana an Pembangu nan Perangkat Daerah Bidang Infrastrukt ur	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		dokum en	5	4	249.999.620	4	249.999.620	4	249.999.620	4	249.999.620	4	249.999.620	20	1.249.998.100	Kasubid Perencana an Infrastrukt ur	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Koordinasi Pelaksana an Sinergitas dan Harmonisa si Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang Infrastrukt ur	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		dokum en	1	1	45.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	5	405.000.000	Kasubid Perencana an Infrastrukt ur	Kab. Kuta i Kart ane gara	

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perang kat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera ngen
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Koordinasi Penyusun an Dokumen Perencana an Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah an (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		dokum en	18	18	45.000.000	18	45.000.000	18	45.000.000	18	45.000.000	18	45.000.000	90	225.000.000	Kasubid Perencana an Wilayah	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Asistensi Penyusun an Dokumen Perencana an Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah an	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		dokum en	18	18	100.000.000	18	92.500.000	18	92.500.000	18	92.500.000	18	92.500.000	90	470.000.000	Kasubid Perencana an Wilayah	Kab. Kuta i Kart ane gara	Dukung an terhada p progra m dedikas i Progra m Kukar Bebaya
			Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi		dokum en	n.a	1		1		1		1		1		5			Kab. Kuta i Kart ane gara	

Tujuan Perang kat Daerah	Sasaran Perang kat Daerah	Program ,Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Pro gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelom pok Sasara n	Satuan	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lok asi	Ketera ngen
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Pelaksana an Monitoring dan Evaluasi Penyusun an Dokumen Perencana an Pembangu nan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah an	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		dokum en	18	18	249.999.820	18	249.999.820	18	249.999.820	18	249.999.820	18	249.999.820	90	1.249.999.100	Kasubid Perencana an Wilayah	Kab. Kuta i Kart ane gara	
		Koordinasi Pelaksana an Sinergitas dan Harmonisa si Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang Kewilayah an	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		dokum en	1	1	45.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	5	405.000.000	Kasubid Perencana an Wilayah	Kab. Kuta i Kart ane gara	
								32.158.324.218		32.574.269.893		32.546.845.893		32.925.807.133		32.596.845.893		162.802.093.030			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dirumuskan indikator Kinerja yang mendukung urusan perencanaan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen dari perangkat daerah dalam hal ini BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.

Indikator kinerja BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan indikator kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan indikator program yang dilaksanakan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12. Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Skor Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Skala Regional/Provinsi.	2,111 (1)	2,20 (1)	2,30(1)	2,40(1)	2,50 (1)	2,60 (1)	2,60 (1)
2	Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	93.06	94,00	95,00	96,00	96,5	97,00	97,00
3	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing program kegiatan dan sub kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

8.1 Kesimpulan

Dokumen rencana strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 ini akan menjadi kerangka dasar bagi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2016– 2021, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Dokumen rencana strategis ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu sejak Renja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan maka Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 ini tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, penting bagi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara untuk selalu memperhatikan aspek koordinasi dalam perencanaan beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

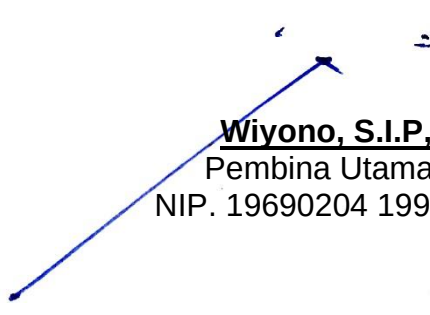
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 ini disusun dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Kalimantan Timur maupun yang bersumber dari APBN, tetap memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang

ada di atasnya diantaranya (RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara).

Untuk itu terkait dengan kaidah pelaksanaan, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai leading sector yang diberikan kewenangan merencanakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di urusan perencanaan agar senantiasa bekerja bersama sesuai dengan standar operasional prosedur untuk menghasilkan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan dalam bentuk target kinerja dan realisasi sesuai kaidah dan aturan yang berlaku

Sebagai penutup, Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016–2021 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara

Tenggarong, September 2021
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



Wiyono, S.I.P, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690204 199003 1 009